PENGARUH KUALITAS SDM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT 2020-2024

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

NESHA RAHMANDA SUCI

NIM. 3222076

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan utama untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga diarahkan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan dapat tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Pendapatan tidak hanya mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga menggambarkan sejauh mana hasil pembangunan telah terdistribusi secara adil di antara seluruh lapisan masyarakat.[1]

Namun, dalam kenyataannya, banyak negara berkembang menghadapi persoalan ketimpangan atau ketidakseimbangan perkembangan antarwilayah dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi. Ketimpangan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak berlangsung secara

[1] Puput Sawal Sartono et al., *Buku Ajar Teori Ekonomi Makro (Edisi Ketiga)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 66

merata, di mana sebagian wilayah mengalami kemajuan pesat sementara wilayah lainnya tertinggal.[2]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun 2024 tumbuh 5,03%, dan 2025, tumbuh sebesar 5,11% yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2024.[3] Secara teori, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dijelaskan oleh teori U terbalik dari Simon Kuznets, menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki modal, pendidikan, keterampilan, dan akses ekonomi yang lebih baik. Setelah pembangunan semakin merata, ketimpangan akan mulai menurun karena kesempatan kerja, pendidikan, dan pendapatan mulai tersebar ke seluruh lapisan masyarakat.[4] Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi, pendapatan, dan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah, namun apabila hasil pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir naik,

[2] Masruri, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah DI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016). Hlm.2-3

[3] "Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2025/02/05/2408/Ekonomi-Indonesia-Tahun-2024-Tumbuh-5-03-Persen--c-to-c---Ekonomi-Indonesia-Triwulan-Iv-2024-Tumbuh-5-02-Persen--y-on-y---Ekonomi-Indonesia-Triwulan-Iv-2024-Tumbuh-0-53-Persen--q-to-q--.Html," n.d.

[4] Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Indonesia: Erlangga, 2006).

pemerataan hasil pembangunan antarprovinsi maupun antar kabupaten/kota masih belum merata.

Ketimpangan pendapatan tejadi karena adanya ketidaksamaan pendapatan di suatu daerah dengan daerah yang lainnya, artinya pada suatu wilayah ada sebagian besar masyarakatnya menghasilkan atau menikmati upah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya yang masyarakatnya hanya bisa menikmati pendapatan yang sangat rendah, dengan adanya ketidaksamaan pendapatan yang diterima disetiap wilayah yang nantinya akan berakibat kepada tingginya angka ketimpangan.[5]

Dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, salah satu indikator yang sering digunakan adalah rasio gini. Rasio gini menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari pemerataan sempurna, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1[6]. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai *gini ratio* nasional pada September 2024 tercatat sebesar 0,381 yang menunjukkan bahwa ketimpangan masih berada pada kategori tingkat sedang dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data BPS, nilai *gini ratio* Provinsi Sumatera Barat menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya

[5] Dewi Zaini Putri Hanifa Muslimah, "Pengaruh Aglomerasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Ketimpangan Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *JKEP: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembanguan* 3, no. 3 (2021): 9–18, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12365. Hlm. 10

[6] Dian Wijayanto, *Buku Ajar Ekonomi Perikanan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). Hlm 9-12

tercapai meskipun pertumbuhan ekonomi mulai pulih setelah COVID-19. Sebagiaman yang terlihat pada pada tabel berikut:

Tabel 1.1

***Gini Ratio*, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat**

2020-2024

Kabupaten/Kota	Ketimpangan Dsitribusi Pendapatan *(Gini Ratio)*					Kualitas SDM (Indeks Pembangunan Manusia) (%)					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kab.Kepulauan Mentawai	0,273	0,321	0,233	0,259	0,267	63,71	63,98	64,83	65,79	66,67	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
Kab. Pesisir Selatan	0,264	0,253	0,246	0,259	0,224	70,87	71,01	71,72	72,24	72,87	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
Kab. Solok	0,277	0,246	0,243	0,235	0,241	70,44	70,60	71,39	71,92	72,29	4,65	4,67	5,89	4,99	4,91
Kab. Sijunjung	0,269	0,270	0,243	0,263	0,239	70,36	70,48	71,32	72,30	72,88	5,30	3,57	4,87	4,71	4,73

Kab. Tanah Datar	0,273	0,250	0,251	0,260	0,258	74,01	74,14	74,87	75,57	76,49	4,79	4,63	5,91	5,35	5,30
Kab. Padang Pariaman	0,257	0,269	0,245	0,257	0,253	72,80	72,92	73,67	74,54	74,90	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
Kab. Agam	0,278	0,272	0,298	0,255	0,249	73,11	73,20	73,84	74,44	75,08	4,61	5,06	4,93	4,96	4,73
Kab. Lima Puluh Kota	0,222	0,244	0,208	0,194	0,220	70,82	71,03	71,64	72,05	72,51	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
Kab. Pasaman	0,310	0,248	0,230	0,243	0,217	68,35	68,48	69,12	69,85	70,61	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
Kab. Solok Selatan	0,307	0,277	0,253	0,271	0,313	70,69	70,88	71,36	72,24	73,17	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30
Kab. Dharmasraya	0,280	0,268	0,287	0,291	0,233	72,30	72,65	73,19	73,87	74,82	5,31	5,00	6,23	6,22	6,02
Kab. Pasaman Barat	0,258	0,261	0,277	0,238	0,240	70,30	70,57	71,39	72,03	72,78	4,69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota Padang	0,312	0,343	0,354	0,312	0,324	83,22	83,30	83,69	83,98	84,38	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88
Kota Solok	0,286	0,277	0,288	0,256	0,251	78,41	78,53	79,35	79,66	80,06	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
Kota Sawahlunto	0,300	0,295	0,314	0,308	0,299	73,97	74,35	75,21	75,91	76,68	8,20	6,38	5,00	4,98	5,55
Kota Padang Panjang	0,394	0,306	0,296	0,273	0,266	78,43	78,52	79,28	79,76	80,60	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94

Kota Bukittinggi	0,265	0,286	0,317	0,255	0,272	80,68	80,79	81,52	81,88	82,61	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72
Kota Payakumbuh	0,325	0,316	0,311	0,316	0,313	79,06	79,24	79,70	80,14	80,76	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
Kota Pariaman	0,310	0,301	0,272	0,289	0,281	78,55	78,72	79,31	79,76	80,49	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32
Provinsi Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75

Sumber: Bps Sumatera Barat, Data Diolah 2025

Tabel 1 menunjukkan rasio gini yang berbeda di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama 2020-2024. Secara umum, *gini ratio* sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan nilai yang berfluktuasi antar daerah. Nilai *gini ratio* tertinggi terdapat di Kota Padang 0,324 dan Kota Payakumbuh 0,313 pada tahun 2024, yang menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Sedangkan, nilai terendah tercatat di Kabupaten Lima Puluh Kota 0,220 dan Kabupaten Pasaman 0,217 pada tahun 2024. Hal ini menunjukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi dan fluktuasi, walaupun pertumbuhan ekonomi nasional membaik.

Salah satu faktor dalam ketimpangan yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut pembangunan ekonomi, kualitas SDM merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Perbedaan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja menyebabkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat dengan kualitas SDM yang lebih baik cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat dengan kualitas SDM rendah.[7]

[7] M Arofah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia* (Surabaya, 2017). Hlm. 92

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia karena IPM mencerminkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia merupakan komponen dalam menanggulangi ketimpangan pendapatan daerah.[8]

Pada tabel 1, IPM di seluruh kabupaten/kota meningkat setiap tahun selama 2020–2024. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dari 63,71 2020 menjadi 66,67 pada tahun 2024, menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia di wilayah tertinggal. Kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Padang 84,38 di tahun 2024, diikuti oleh Kota Bukittinggi 82,61 dan Kota Padang Panjang 80,60. Namun, peningkatan IPM tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan, seperti di Kota Padang, di mana IPM meningkat namun *gini ratio* tetap tinggi sebesar 0,324. Fenomena ini menunjukkan adanya *gap theory* antara peningkatan kualitas SDM dan pemerataan distribusi pendapatan di tingkat daerah.

IPM mencerminkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan, hidup sehat, dan memiliki daya beli yang baik. Semakin tinggi IPM suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas SDM di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya IPM menunjukkan masih terbatasnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan

[8] Aris Soelistyo, *Model Maroekonometrik: Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia* (Jawa Timur: Uwais Inspiasi Indonesia, 2023). Hlm 89-91

kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memicu ketimpangan distribusi pendapatan.[9] Berdasarkan teori *Human Capital*, peningkatan kualitas SDM seharusnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, apabila peningkatan kualitas SDM hanya terjadi di daerah perkotaan atau pusat pertumbuhan, maka kondisi tersebut justru dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antarwilayah.[10]

Selain kualitas SDM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan karena tingginya pengangguran menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh pendapatan atau hanya memperoleh pendapatan yang rendah. Akibatnya, pendapatan menjadi lebih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang bekerja dan memiliki akses ekonomi lebih baik.[11] Tingginya angka pengangguran menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan pendapatan antarwilayah.[12] Dari sisi teori makroekonomi menurut Todaro dan Smith, tingginya pengangguran menandakan bahwa sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap pendapatan yang layak, sehingga memperlebar jarak antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Semakin tinggi TPT di

[9] Ratu Eva Febriani et al., *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, ed. Weni Yuliani (Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia, 2025). Hlm. 36

[10] Titu Maria Anita et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023). Hlm. 52

[11] Dika Romadona et al., "Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi , Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia" 3, no. 1 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.2774.

[12] Kaluge David et al., *Ekonometrika Terapan: Dari Klasik Hingga Machine Learning (Teori Dan Aplikasi)* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2025). Hlm 56

suatu daerah, maka semakin besar pula potensi terjadinya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. [13]

Pada tabel 1 secara umum, TPT Provinsi Sumatera Barat menurun dari 6,88% pada 2020 menjadi 5,75% pada 2024. Daerah dengan pengangguran tertinggi adalah Kota Padang 9,88% pada tahun 2024, kemudian Kabupaten Padang Pariaman 6,59% dan Kabupaten Dharmasraya 6,02%. Sebaliknya, daerah dengan pengangguran terendah adalah Kabupaten Solok Selatan 2,30% dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 1,44%. Walaupun pengangguran menurun, penurunan tidak merata antarwilayah. Penurunan TPT tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan, sebagaimana terlihat pada Kota Padang, di mana TPT menurun namun *gini ratio* tetap tinggi 0,324 pada 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya *gap theory* antara penurunan tingkat pengangguran terbuka dan pemerataan distribusi pendapatan di tingkat daerah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya temuan yang berbeda terkait pengaruh kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Lois Lasyana Narwastu[14] serta Riza Umaroh, menemukan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara penelitian oleh Fatimah[15] dan Siti Naeni

[13] Antje Tuasela and Nurlela, *Ekonomi Pembangunan*, ed. Puput Tri Cahyono (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025). Hlm 272-175

[14] Lois Lasyana Narwastu, "Analisis Kausalitas Kualitas Sumber Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013" (2015).

[15] Fatimah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Nur Khaeni[16], menunjukkan hasil yang berbeda, yang menyatakan tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian menandakan bahwa belum ada kesamaan atau kesepakatan mengenai arah dan kekuatan hubungan antara kualitas SDM dan Tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi secara agregat, belum banyak yang menganalisis secara lebih spesifik pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat**,** sehingga nanti dapat memberikan gambaran secara keseluruhan terkait ketimpangan distribusi pendaptan pada masing-masing daerah terutama pada periode 2020–2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, penulis memilih untuk mengangkat topik ini dalam penelitian yang berjudul "**Pengaruh Kualitas SDM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024**".

B. Identifikasi Masalah

1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan kualitas SDM tidak sesuai dengan perkembangan *gini ratio* yang menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan di beberapa kabupaten/kota, di mana tidak menunjukkan hubungan negatif.

[16] Siti Naeni Nur Khaeni, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak sesuai dengan perkembangan *gini ratio* yang menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan di beberapa kabupaten/kota, di mana tidak menunjukkan hubungan positif.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh kualitas SDM dan Tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data IPM sebagai indikator variable kualitas SDM, TPT, *ratio gini* sebagai indikator variabel ketimpangan distribusi pendapatan dari tahun 2020 hingga 2024.

D. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh kualitas SDM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024?
3. Seberapa besar pengaruh kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas SDM terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024
b. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024
c. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas SDM dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024.

2. Manfaat Penelitian
   a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai pengaruh kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat.
   b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan tingkat pengangguran.
   c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk kajian sejenis di masa mendatang, baik dengan pendekatan yang sama maupun dengan penambahan variabel lain.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih lanjut.

1. Pengaruh

   Suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa saja yang ada di sekitarnya.[17]

2. Kualitas SDM

   Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat kemampuan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, yang dimiliki penduduk sehingga mereka dapat berkontribusi pada pada pembangunan ekonomi.[18] Kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.[19]

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

---

[17] 2014. Yususf, MuriYususf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: KENCANA, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2014). Hlm. 77

[18] Arif Rahman, M Syafii, and Sukma Hayati Hakim, *Kesejahteraan Dan Indikator Kunci Pembangunan* (Medan: Media Kreasi Group, 2021). Hlm 112

[19] Wiji Rahayu Maratus Saidah Rohmah, Muhammad Daffa Ruddin Alwi, and Marchelino Vidianto, "Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Per Kapita, Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) Di 12 Provinsi Pada Tahun 2019-2023," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Kebijakan (JESK)* 06, no. 01 (2024): 3, https://doi.org/https://doi.org/10.21274/jeps.v6i01.11033. Hlm. 3

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja uasia 15-64 tahun tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha sendiri.[20]

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan bisa disebabkan karena ketidak sesuaian anatar kesempatan kerja dengan pendidikan, lapangan pekerjaan tidak tersedia ataau tidak mau bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk presentase. [21]

4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi dimana perbedaan jurang antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan tingkat penerimaan pendapatan antarindividu, sehingga menimbulkan jarak atau kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Ketimpangan distribusi pendapatan muncul akibat adanya perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah, perbedaan

[20] Nurul Yaqin, *Pembangunan Nasional Pasca Reformasi Perspektif Sejarah Islam Dan Fiqih Imam Asy-Syafi'I* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2024). Hlm. 31

[21] Alam, *Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas XI KTSP Standar Isi 2006* (Indonesia: Esis, 2007). Hlm. 6-9

pendapatan yang signifikan antarwilayah akan menimbulkan meningkatnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.[22]

[22] Tuasela and Nurlela, *Ekonomi Pembangunan*. Hlm. 57

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

a. Pengertian Ketimpangan Distibusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian hasil kegiatan ekonomi. Distribusi pendapatan menunjukkan bagaimana hasil ekonomi dibagikan di antara anggota masyarakat. Ketika pembagian pendapatan tidak berjalan efektif, maka akan muncul ketimpangan kekayaan, yang menjadi indikator tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, distribusi pendapatan menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana pemerataan hasil pembangunan telah tercapai di suatu wilayah.[23]

Ketimpangan distribusi pendapatan menggambarkan kondisi ketika terdapat perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan dalam jumlah pendapatan menciptakan jarak ekonomi dalam masyarkat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, sehingga muncul kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan dan kegiatan ekonomi belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan penduduk.

[23] Muhammad Rapii, Huzain Jailani, and Danang Prio Utomo, *Perekonomian Indonesia* (Jawa Barat: CV Jejak, 2022). Hlm. 49

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi ketika hasil pembangunan ekonomi tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan mencerminkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di suatu wilayah.[24]

Dengan demikian, ketimpangan distribusi pendapatan dapat disimpulkan merupakan kondisi ketika hasil dari upaya pembangunan tidak terbagi dan dinikmati secara merata di lapisan masyarakat dalam suatu negara. Akibatnya, terbentuk jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, yang menimbulkan kesenjangan sosial serta menjadi indikator belum tercapainya pemerataan hasil pembangunan di suatu wilayah.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

1) Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia (SDM) salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Modal manusia yang diperoleh melalui pendidikan dan kesehatan berperan besar dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Namun, pada kenyataannya tidak semua individu memiliki akses, kesempatan, maupun fasilitas yang setara untuk mendapatkan modal manusia tersebut. Perbedaan akses

[24] Muhammad Daffa Rifaldo and Rejekiningsih, "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2015-2019," *Diponegoro Journal Of Economics* 13, no. 2 (2024): 27, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djoe.43258. Hlm. 31"

inilah yang kemudian memunculkan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.[25] Menurut teori *human capital*, pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas manusia, sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sitepu, yang menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata karena meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh. Sebaliknya, rendahnya kualitas SDM akibat keterbatasan pendidikan dan kesehatan justru menjadi salah satu faktor utama yang memperlebar jurang ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.[26]

2) Pengangguran Tinggi (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan semakin besar, secara otomstis masyarakat kehilangan akses terhadap sumber penghasilan tetap yang seharusnya dapat menopang kebutuhan hidup. Sementara itu, kelompok masyarakat yang masih bekerja

[25] Paulus Kurniawan and Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015). Hlm. 103

[26] Syayuti, *Investasi Ekonomi Dan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi* (Jawa Tengah: NEM, 2022). HLM. 19

tetap memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan kemampuan ekonomi yang semakin mencolok antara masyrakat yang bekerja dan yang menganggur.[27]

Ketimpangan pendapatan semakin terasa karena tingginya pengangguran yang berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kesejahteraan tidak terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula peluang terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, karena aliran pendapatan hanya berpusat pada kelompok yang memiliki pekerjaan, sedangkan kelompok yang menganggur semakin tertinggal dalam struktur ekonomi.[28]

3) Adelman dan Morris, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan adalah:[29]
   a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi, faktor penting yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika laju pertumbuhan penduduk meningkat dengan sangat cepat, jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja juga bertambah dalam waktu singkat. Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak

[27] David Kaluge et al., *Ekonomi Terapan:Dari Klasik Hingga Machine Learning (Teori Dan Aplikasi)* (Depok: Rajawali Press, 2025). Hlm. 46

[28] Muhammad Rapii, Huzain Jailani, and Danang Prio Utomo, *Perekonomian Indonesia* (Jawa Barat: CV Jejak, 2022) Hlm. 53

[29] Humaidah Muafiqie et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi Pendekatan Makro Dan Mikro* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023). Hlm. 124

sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang mampu menampung pencari kerja. Ketidakseimbangan antara kebutuhan kerja dan kesempatan kerja menyebabkan banyak individu tidak memperoleh pekerjaan yang layak dan tetap menganggur, kemudian berdampak pada penurunan pendapatan per kapita, karena hasil pembangunan harus dibagi kepada jumlah penduduk yang semakin besar. Dengan demikian, meskipun pembangunan ekonomi terus berjalan, jumlah penduduk yang semakin banyak dan tidak tertampung dalam lapangan kerja membuat pendapatan yang diterima per orang menjadi semakin kecil dan pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

b) Inflasi muncul ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang memadai. Kondisi ini mendorong kenaikan harga-harga secara umum sehingga nilai uang melemah. Akibatnya, daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada pada kelompok berpendapatan rendah, mengalami penurunan karena pendapatan yang mereka miliki tidak mampu mengikuti kenaikan harga. yang akhirnya menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar, karena kelompok berpendapatan tinggi cenderung lebih mampu bertahan dibandingkan kelompok lainnya.

c) Ketimpangan pembangunan antar daerah, ketimpangan pembangunan antar daerah terjadi ketika proses pembangunan lebih banyak dipusatkan pada wilayah tertentu saja, sehingga daerah lain tidak memperoleh perhatian dan dukungan yang seimbang. Kondisi pembangunan yang terfokus pada satu kawasan membuat wilayah lain tertinggal dalam berbagai aspek penting. Perbedaan kemampuan daerah dalam mengakses infrastruktur, layanan pendidikan yang memadai, serta peluang ekonomi yang tersedia akhirnya menimbulkan jurang ketidaksetaraan. Ketidaksamaan akses dan kesempatan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketidakmerataan distribusi pendapatan antarwilayah.

c. Dampak Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan menggambarkan semakin lebarnya jarak antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Berikut dampak dari ketimpangan distribusi pendapatan:[30]

1) Menurunkan Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan pendapatan berdampak langsung pada turunnya kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Rendahnya pendapatan membuat daya beli menurun,

[30] Hidayati et al., *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022). Hlm 152-153

sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

2) Menurunkan Kualitas Pendidikan

Pendapatan yang rendah membuat masyarakat kesulitan membiayai pendidikan, sementara biaya pendidikan terus meningkat setiap tahun. Akibatnya, kualitas pendidikan di kalangan masyarakat bawah menurun dan menghambat peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan dan menimbulkan ketimpangan pendapatan.

3) Menurunkan Kemampuan dan Spesialisasi SDM

Rendahnya akses pendidikan berdampak pada lemahnya kualitas dan daya saing SDM. SDM yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan sulit bersaing di pasar kerja. Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja.

4) Menurunkan Kualitas Kesehatan

Masyarakat berpenghasilan rendah akan mengabaikan kesehatan karena keterbatasan ekonomi. Akibatnya, muncul berbagai masalah kesehatan seperti gizi buruk, stunting, dan penyakit menular yang berdampak pada menurunnya produktivitas kerja.

5) Meningkatkan Pengangguran

Ketimpangan pendapatan berhubungan dengan meningkatnya angka pengangguran. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit bersaing di pasar kerja, menyebabkan banyak dari mereka tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada.

d. Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Teori ketimpangan distribusi pendapatan berawal dari hipotesis yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955, melalui artikel yang berjudul *"Economic Growth and Income Inequality"*. Dalam tulisan tersebut, menurut Kuznets, pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Peningkatan ketimpangan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan antar kelompok penduduk, serta ketidakmerataan kesempatan ekonomi dan mobilitas sosial. Kondisi ini menyebabkan sebagian kelompok masyarakat mampu menikmati manfaat pembangunan lebih awal dibandingkan kelompok lainnya.[31]

Selain itu karena sebagian kecil masyarakat, terutama yang berada di sektor modern dan perkotaan, memperoleh manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kelompok masyarakat di sektor tradisional atau pedesaan masih tertinggal dalam hal produktivitas dan

[31] Saharuddin et al., *Daya Saing SDM Dalam Globalisasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024). Hlm. 20

pendapatan. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar pada fase awal pembangunan.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya tingkat pembangunan, manfaat pertumbuhan ekonomi mulai menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Pada tahap ini, distribusi pendapatan perlahan menjadi lebih merata karena semakin banyak individu yang memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas. Fenomena tersebut digambarkan oleh Kuznets dalam bentuk kurva berbentuk huruf U terbalik, dikenal sebagai *hipotesis U-terbalik (Inverted-U Hypothesis)*. Dimana, pada tahap awal pembangunan, ketimpangan meningkat, kemudian pada tahap menengah, ketimpangan mencapai puncaknya, dan terakhir tahap lanjutan, dimana ketimpangan mulai menurun seiring meluasnya akses pendidikan, industrialisasi yang matang, urbanisasi yang stabil, dan kebijakan redistributif.[32]

Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan karena sektor modern, industri, dan investasi hanya berkembang di wilayah tertentu, terutama di perkotaan. Masyarakat yang memiliki modal, pendidikan, dan akses ekonomi lebih baik akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan masyarakat miskin atau daerah tertinggal. Akan tetapi,

[32] Soekarwo, *Berkaca Dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018). Hlm. 31

setelah pembangunan semakin merata dan kesempatan ekonomi mulai terbuka bagi lebih banyak masyarakat, ketimpangan pendapatan akan menurun.[33] Kuznets juga menegaskan bahwa tahapan peningkatan dan penurunan ketimpangan pendapatan merupakan proses yang wajar dalam perjalanan pembangunan ekonomi suatu negara. Meski demikian, seberapa cepat dan sejauh mana ketimpangan tersebut dapat menurun sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Dengan kata lain, peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan menjadi faktor penting agar pembangunan tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.[34]

e. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pemerataan pendapatan di suatu daerah dapat diukur melalui besarnya nilai rasio gini. Todaro menjelaskan bahwa koefisien gini merupakan indikator ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1.[35]

Indeks Gini atau Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini

[33] Baiq Wihan Sirtama, "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pembuktian Hipotesis Kuznets)" 5, no. 4 (2021): 654–64, https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.17810.

[34] Humaidah Muafiqie et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi Pendekatan Makro Dan Mikro* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023), hlm. 120-121

[35] Jhingan M.l, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2012). Hlm. 12

berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Secara umum, terdapat tiga kategori utama dalam menilai tingkat ketimpangan berdasarkan nilai Indeks Gini, yaitu:[36]

Tabel 2.1

Kategori	***Ratio Gini***
tinggi	*Ratio Gini* ≥ 0,5
Sedang	0,3 ≤ *Ratio Gini* < 0,5
Rendah	*Ratio Gini* < 0,3

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi 2009, gini rasio didefinisikan sebagai suatu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pemerataan pendapatan dalam suatu masyarakat. Pengukuran gini rasio dilakukan berdasarkan distribusi pendapatan yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kelas pendapatan atau decile. Melalui pembagian ke dalam 10 kelas ini, tingkat ketimpangan pendapatan dapat dianalisis secara lebih terstruktur.

[36] Muhammad Syafi'I, *Ekonomi Pembangunan Regional Dan Perkotaan* (Medan: CV Media Kreasi Group, 2023). Hlm. 177-178

Adapun rumus gini rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat ketimpangan tersebut adalah sebagai berikut:[37]

$$GR = 1 - \sum fi\ [Yi + \ Yi - 1]$$

Keterangan rumus:

Fi: jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i

Yi: jumlah komulatif (%) pendapatan pada kelas ke i

f. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Islam tidak melarang adanya perbedaan pendapatan atau kekayaan antarindividu, karena setiap orang memiliki kemampuan, usaha, dan rezeki yang berbeda. Namun, Islam melarang ketimpangan yang terlalu besar hingga menyebabkan penumpukan kekayaan hanya pada kelompok tertentu sementara kelompok lain hidup dalam kemiskinan.[38] Dalam ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan dapat terjadi apabila distribusi kekayaan tidak berjalan dengan baik, misalnya karena penumpukan aset, praktik riba, monopoli, atau rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta "jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam mengakui

[37] Aris Soelistyo, *Model Maroekonometrik: Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia* (Jawa Timur: Uwais Inspiasi Indonesia, 2023), Hlm. 34

[38] Nur Annisa, Abd. Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan," *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume* 7, no. 2 (2025): 234–48, https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876.

adanya kemungkinan ketimpangan, tetapi mengatur agar distribusi kekayaan tetap merata dan berkeadilan.[39]

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan dipandang sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral dan spiritual umat, karena harta diposisikan sebagai amanah yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya pada kelompok tertentu, tetapi harus mengalir secara luas agar tercapai keseimbangan sosial dan ekonomi. Hal ini berakar pada prinsip *al-'adl* (keadilan), yang menuntut pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.[40]

Islam menekankan perlunya intervensi negara melalui kebijakan fiskal syariah untuk memastikan bahwa distribusi pendapatan berjalan adil dan tidak memunculkan akumulasi kekayaan pada segelintir pihak. Distribusi pendapatan dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, sebagaimana tercermin dalam tujuan maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ketika sebagian anggota masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, negara wajib hadir untuk memastikan dukungan dan perlindungan melalui kebijakan yang inklusif. Dengan demikian,

[39] Ummi Kalsum, "Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam," *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 41–59.

[40] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Sumatera Barat: PT RajaGrafindo Persada, 2020). Hlm. 96

ketimpangan pendapatan tidak hanya dianggap sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan sosial dan stabilitas masyarakat.

Instrumen distribusi Islam seperti zakat dan wakaf memiliki peran strategis dalam menekan ketimpangan, karena selain menyalurkan bantuan secara langsung, instrumen tersebut juga mendorong pemberdayaan ekonomi kelompok lemah. Ketika instrumen tersebut dioptimalkan, potensi redistribusi kekayaan menjadi lebih besar sehingga kesenjangan dapat ditekan secara berkelanjutan. Dalam konteks modern, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa sistem distribusi berbasis syariah lebih inklusif dibandingkan sistem konvensional yang berorientasi pada efisiensi pasar semata.[41]

2. Kualitas SDM

a. Pengertian Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat kemampuan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, yang dimiliki penduduk sehingga mereka dapat berkontribusi pada pada pembangunan ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan

[41] Maharani Awaliyah et al., "Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 5 (2025): 340–49, https://doi.org/https:/doi.org/10.5281/zenodo.15667615. Hlm. 134

Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. IPM mencerminkan kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.[42]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun berdasarkan tiga indikator utama, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketiga indikator tersebut dianggap mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat kemajuan kesejahteraan masyarakat, karena masing-masing indikator mencerminkan aspek vital dalam pembangunan manusia. Penetapan IPM pada awalnya dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan alat ukur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menggambarkan sejauh mana suatu negara mampu mengoptimalkan potensi penduduknya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya menekankan pencapaian ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas individu melalui pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, disertai dengan perbaikan kondisi kesehatan keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Keseluruhan proses tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mencapai tingkat

[42] Rahman, Syafii, and Hakim, *Kesejahteraan Dan Indikator Kunci Pembangunan*. Hlm 113

kesejahteraan yang lebih tinggi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.[43]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki fungsi strategis sebagai alat yang digunakan untuk menentukan kategori tingkat kemajuan suatu negara, apakah termasuk negara maju, negara berkembang, ataupun negara yang masih tergolong tertinggal. Selain itu, IPM juga berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Konsep IPM diperkenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 sebagai ukuran yang lebih komprehensif dalam memahami pembangunan manusia secara luas. Seiring perkembangan metodologi, pada tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan terhadap metode penghitungan IPM yang kemudian dikenal sebagai IPM Metode Baru. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mengadopsi metode baru tersebut sejak tahun 2014. Untuk menjaga konsistensi data antar-tahun, BPS juga melakukan proses backcasting sehingga angka-angka IPM dapat dilacak kembali hingga tahun 2010 dan tetap dapat dibandingkan secara akurat dari waktu ke waktu.[44]

[43] Patta Rapanna and Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi* (Makassar: CV Sah Media, 2018). Hlm. 18-19

[44] Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia* (Jakarta: INDOCAMP, 2018). Hlm. 8

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya menggambarkan kemampuan penduduk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan keterampilan sehingga mereka mampu berperan secara produktif dalam pembangunan ekonomi. Untuk menilai kualitas tersebut, UNDP menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang komprehensif, karena mengukur dimensi harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. IPM tidak hanya menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan sejauh mana suatu negara mampu mengembangkan potensi manusianya secara berkelanjutan. Peningkatan IPM berpengaruh langsung terhadap pasar tenaga kerja, di mana SDM yang lebih berkualitas dapat terserap dengan lebih baik sehingga menurunkan pengangguran dan pada akhirnya membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, IPM menjadi alat strategis untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia serta efektivitas kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 sebagai alat untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Melalui IPM, dapat diketahui tingkat akses penduduk terhadap berbagai aspek penting kesejahteraan seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia dikembangkan melalui suatu pendekatan yang berfokus pada tiga dimensi dasar pembangunan. Ketiga dimensi tersebut meliputi aspek umur panjang dan hidup sehat, aspek pengetahuan, serta aspek standar hidup layak. Dalam proses pengukuran dimensi kesehatan, indikator yang digunakan adalah angka harapan hidup, karena indikator ini dianggap mampu mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk. Selanjutnya, untuk menilai dimensi pengetahuan, digunakan indikator angka harapan lama sekolah yang menunjukkan rata-rata waktu yang diharapkan seseorang dapat mengenyam pendidikan. Adapun dalam menilai dimensi standar hidup layak, indikator yang digunakan adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok. Kemampuan ini diukur melalui rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian pembangunan memungkinkan individu untuk hidup secara layak.[45]

Secara umum, IPM dibentuk dari tiga indikator utama, yaitu:[46]

1) Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup saat lahir mengukur rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dimiliki bayi yang baru lahir jika

[45] Maudina Armini et al., *Dari Angka Menuju Makna Memahami Arah Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025). Hlm. 28

[46] Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, and Nurul Azizah Az Zakiyyah, *Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Tantangan Di Negara Berkembang* (Yogyakarta: UAD Press, 2021). Hlm. 82

tingkat kematian menurut pola usia yang berlaku tetap. Secara praktis indikator ini merefleksikan kualitas layanan kesehatan dasar, sanitasi, gizi, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi probabilitas seseorang mencapai usia tua. Karena itu, peningkatan angka harapan hidup menandakan kemajuan dalam perlindungan kesehatan masyarakat dan menurunnya kematian dini yang dapat mengangkat capaian dimensi kesehatan dalam IPM.

2) Pendidikan

Dimensi pendidikan pada IPM tidak lagi hanya melihat melek huruf tetapi diukur dengan dua variabel utama:

a) Harapan lama sekolah, yaitu jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah pada kondisi sistem pendidikan saat ini
b) Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata lama pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Kedua ukuran ini menangkap akses ke pendidikan formal (berapa lama siswa bisa/biasanya bersekolah) sekaligus akumulasi pendidikan di populasi. Gabungan kedua ukuran ini memberi gambaran yang lebih kaya tentang kualitas dan keluasan pendidikan di suatu wilayah.

3) Standar Hidup Layak

Standar hidup layak pada IPM diwakili oleh ukuran ekonomi per kapita yang mencerminkan kemampuan rumah tangga

memenuhi kebutuhan dasar. Di tingkat nasional/daerah BPS menggunakan pengukuran pengeluaran riil per kapita (disesuaikan) sebagai proxy untuk standar hidup karena data pengeluaran lebih representatif untuk kesejahteraan riil rumah tangga dibandingkan PDB per kapita. Indikator ini biasanya distandarisasi (menggunakan transformasi logaritma) sehingga perbandingan lintas wilayah atau waktu menjadi wajar. Karena IPM dihitung sebagai agregat ketiga dimensi ini, perbaikan standar hidup layak akan langsung menaikkan skor IPM apabila kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan capaian.

c. Perhitungan Indeks Pmebangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru yang diterapkan sejak tahun 2010 terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Terjadi beberapa perubahan penting, di antaranya indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti menjadi Angka Harapan Lama Sekolah**,** sementara Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita digantikan dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), metode perhitungan baru ini memiliki beberapa keunggulan. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, IPM dapat mencerminkan kondisi pendidikan masyarakat lebih relevan dan akurat terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Penggunaan PNB per kapita juga dinilai lebih tepat karena menunjukkan pendapatan riil yang diterima masyarakat di suatu wilayah. Penerapan rata-rata geometrik dalam perhitungan IPM berarti capaian pada satu dimensi tidak dapat menutupi kekurangan pada dimensi lainnya. Dengan kata lain, untuk mencapai pembangunan manusia yang optimal, ketiga dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak harus berkembang secara seimbang. Maka, konsep IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, yaitu:[47]

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan\ x\ Ipendidikan\ x\ Ipengeluaran}\ \text{x } 100$$

Nilai indeks dari setiap komponen yang dihitung ditempatkan pada rentang antara 0 sampai 1, di mana angka 0 merepresentasikan kondisi yang paling rendah atau paling buruk, sedangkan angka 1 mencerminkan kondisi yang paling tinggi atau paling baik. Untuk memudahkan proses pembacaan serta penafsiran oleh pengguna data, nilai indeks yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk skala ratusan dengan cara mengalikan hasil perhitungannya dengan angka 100.

Setiap indeks dari komponen IPM tersebut pada dasarnya dihitung melalui proses perbandingan, yaitu dengan mengukur selisih antara nilai

[47] Win Konadi et al., *Penduduk Dan Pembangunan:Analisis Demografis Dan Empiris* (Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2025). Hlm. 115-116

indikator aktual dengan nilai minimum indikator, kemudian membandingkannya dengan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Secara umum, formulasi perhitungan indeks tersebut dapat disajikan melalui rumus berikut:[48]

$$\text{indeks X(i)} = \frac{X(i) - X(i)\,min}{X(i)\,maks - X(i)\,min}$$

Keterangan:

X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)

X(i) maks : Nilai maksimum X(i)

X(i) min : Nilai minimum X(i)

d. Kategori Indeks Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

Tabel 2.2

Kategori	Capaian IPM
Sangat tinggi	IPM ≥ 80
Tinggi	70 ≤ IPM < 80
Sedang	60 ≤ IPM < 70
Rendah	IPM < 60

[48] Badan Pusat Statistik, *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016* (Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018). Hlm. 7-9

Nilai IPM yang tinggi pada dasarnya mencerminkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah berada pada kondisi yang baik. Hal ini terlihat melalui tingkat pembangunan manusia yang semakin maju, yang ditunjukkan oleh harapan hidup yang lebih panjang, akses pendidikan yang lebih memadai dan merata, serta taraf hidup ekonomi yang semakin meningkat. Sebaliknya, nilai IPM yang rendah menggambarkan bahwa terdapat persoalan yang cukup serius pada satu atau lebih dari tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kondisi tersebut menandakan bahwa kualitas SDM masih menghadapi berbagai keterbatasan. Selain itu, perubahan nilai IPM dari tahun ke tahun berfungsi sebagai gambaran penting untuk memahami apakah suatu negara atau daerah mengalami kemajuan atau justru kemunduran dalam upaya mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan, sehingga IPM dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas pembangunan kualitas SDM secara berkesinambungan.[49]

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, tengah mempersiapkan usaha, telah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja, serta mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak

[49] Thomas Ola Langoday, *Ekonomi Pembangunan: Membangun Negeri Unggul Dan Berperadaban* (Banyumas: Arta Media, 2024). Hlm. 195

memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Secara umum, pengangguran merupakan bagian dari penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang belum memperoleh pekerjaan meskipun sedang berupaya mencari. Pengukuran mengenai kondisi pengangguran dalam suatu negara umumnya disebut sebagai tingkat pengangguran, yaitu ukuran yang menunjukkan jumlah penganggur dalam bentuk persentase dari keseluruhan angkatan kerja. Individu yang sedang berupaya memperoleh pekerjaan namun pada saat yang sama tidak memiliki pekerjaan digolongkan sebagai penganggur. Adapun angkatan kerja itu sendiri merupakan keseluruhan jumlah penduduk yang termasuk dalam kelompok umur tertentu yang terdiri atas mereka yang sedang bekerja maupun yang tidak bekerja.[50]

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk dalam kelompok angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, baik karena belum bekerja sama sekali maupun sedang berupaya mencari pekerjaan. Sukirno menjelaskan bahwa penganggur bukan hanya mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga mencakup individu yang aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil memperolehnya. Dengan kata lain, pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja berkeinginan untuk bekerja, tetapi belum mendapatkan kesempatan.[51]

[50] Maudina Armini et al., *Dari Angka Menuju Makna Memahami Arah Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), Hlm. 5

[51] Humaidah Muafiqie et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi Pendekatan Makro Dan Mikro* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023), Hlm. 80

Tingginya angka pengangguran berpotensi memperlebar kesenjangan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketimpangan ekonomi, tetapi juga dapat menurunkan keterampilan individu serta mengurangi peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, dapat memperparah ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Sejalan dengan pandangan Romadona dkk., pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kerja dan hilangnya kesempatan karier, yang pada akhirnya memperdalam kesenjangan ekonomi di Masyarakat.[52]

b. Jenis-jenis Pengangguran

1) Pengangguran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis apabila ditinjau dari penyebabnya :[53]

a) Pengangguran normal atau friksional, suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif sedang berupaya mencari pekerjaan, namun pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan minat, keahlian, atau harapan yang dimilikinya.

b) Pengangguran tekonologi, pengangguran yang muncul sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat.

[52] Nesha Rizky Ashari et al., "Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 13, no. 2 (2024): 293–302, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139. Hlm. 95

[53] Meri Rahmania, *Teori Ekonomi Makro* (Padang: CV Gita Lentera, 2025). Hlm. 63

Kondisi ini terjadi ketika proses otomatisasi, digitalisasi, atau penggunaan mesin-mesin modern menggantikan peran tenaga kerja manusia dalam berbagai sektor pekerjaan.

c) Pengangguran siklikal, merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi. Yang berakibat pemutusan hubungan kerja

d) Pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang disebabkan perubahan pada struktur perekonomian suatu negara atau wilayah. Perubahan ini bisa berupa pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, kemajuan teknologi, maupun peralihan jenis keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Akibatnya, tenaga kerja dengan keahlian lama tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri yang baru, sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan membutuhkan pelatihan ulang untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

2) Pengangguran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis apabila ditinjau dari cirinya:[54]

a) Pengangguran terbuka, kondisi ketika jumlah kesempatan kerja yang tersedia di suatu perekonomian tidak sebanding dengan laju pertambahan tenaga kerja yang terus meningkat. Akibatnya, semakin banyak individu yang siap dan mampu bekerja namun

[54] Moh Suardi, *Pengantar Ekonomi Makro* (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2024). Hlm 109-112

tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai, sehingga menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di masyarakat.

b) Pengangguran tersembunyi, menggambarkan situasi di mana jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi melebihi kebutuhan yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi tenaga kerja secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dan kebutuhan riil tenaga kerja dalam suatu sistem ekonomi.

c) Pengangguran musiman, pengangguran yang umumnya terjadi pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan perikanan. Jenis pengangguran ini muncul karena aktivitas kerja sangat bergantung pada kondisi musim. Sebagai contoh, pada saat musim hujan, para nelayan tidak dapat melaut akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung, sehingga terpaksa menganggur

d) Setengah menganggur, kondisi ketika seseorang sebenarnya memiliki pekerjaan, namun tidak bekerja secara penuh waktu. Jam kerja jauh lebih sedikit dibandingkan jam kerja normal, misalnya hanya bekerja selama satu hingga dua minggu dalam sebulan, atau hanya satu sampai empat jam setiap harinya.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran sebagai berikut:[55]

1) Pertumbuhan Ekonomi Melambat

Ketika laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, hal ini secara langsung berdampak pada penurunan aktivitas produksi di berbagai sektor industri. Akibatnya, permintaan terhadap tenaga kerja berkurang karena perusahaan-perusahaan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan operasional. Sehingga banyak entitas bisnis terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan yang ada atau menangguhkan proses perekrutan tenaga kerja baru untuk menghemat biaya. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan angka pengangguran secara signifikan, karena individu-individu yang kehilangan pekerjaan sulit menemukan peluang kerja alternatif dalam waktu singkat.

2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu penyebab utama tingginya tingkat pengangguran adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, di mana tenaga kerja yang memiliki keterampilan terbatas dan tingkat pendidikan rendah mengalami kesulitan untuk bersaing secara efektif di pasar kerja yang kompetitif. Hal ini tercermin dari nilai

[55] Zulaikah and Anas Malik, *Ekonomi Makro Islam* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi, 2023). Hlm. 164

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, yang menunjukkan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, kondisi kesehatan yang belum optimal, serta standar kehidupan yang belum mencapai tingkat yang layak. Dengan demikian, produktivitas dan kemampuan bersaing dari tenaga kerja tersebut ikut menurun, sehingga peluang pekerjaan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh angkatan kerja yang ada. Akibatnya, fenomena ini berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran yang berkepanjangan.[56]

3) Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi

Apabila jumlah penduduk dalam kategori usia produktif terus mengalami peningkatan, maka kebutuhan akan lapangan pekerjaan juga akan meningkat secara proporsional. Namun, jika laju pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi tersebut, maka ketidakseimbangan ini akan menghasilkan peningkatan jumlah individu yang menganggur. Situasi ini sering terjadi di wilayah dengan demografi yang dinamis, di mana angkatan kerja baru masuk ke pasar tanpa adanya penambahan posisi kerja yang memadai, sehingga memperburuk masalah pengangguran secara keseluruhan.

[56] Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* (Malang: UB Press, 2011). Hlm. 250

4) Rendahnya Laju Investasi Produktif

Kondisi di mana tingkat investasi produktif berada pada level yang rendah akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Dengan minimnya aliran investasi, perluasan kegiatan usaha dan pembangunan infrastruktur menjadi terbatas, yang pada gilirannya menekan permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran tetap tinggi karena tidak ada dorongan yang cukup untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja, sehingga ekonomi sulit pulih dari stagnasi.

d. Perhitungan Tingkat Pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk dalam kelompok angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, baik karena belum bekerja sama sekali maupun sedang berupaya mencari pekerjaan. Dalam pendekatan angkatan kerja, persentase tingkat pengangguran dihitung dengan membandingkan jumlah total pengangguran terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja.[57]

[57] Maudina Armini et al., *Dari Angka Menuju Makna Memahami Arah Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), Hlm. 64

Untuk menghitung besarnya tingkat pengangguran terbuka, dapat diterapkan rumus sebagai berikut:

$$Tingkat\ Pengangguran = \frac{Jumlah\ pengangguran}{Jumlah\ angkatan\ kerja}\ x\ 100\%$$

4. Hubungan Kualitas SDM dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menentukan kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan berpenghasilan lebih tinggi. Ketika proporsi tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil meningkat, rata-rata produktivitas tenaga kerja naik sehingga peluang untuk menerima upah lebih tinggi dan akses ke pekerjaan formal bertambah. Akibatnya, porsi penduduk yang sebelumnya berada pada penghasilan rendah berpeluang naik ke lapisan berpenghasilan menengah, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan berkurang. Dimana kualitas SDM bergantung pada pemerataan akses pendidikan dan Kesehatan, jika peningkatan kualitas SDM hanya dinikmati kelompok tertentrntu, maka ketimpangan distribusi pendapatan justru bisa melebar karena kelompok lain tertinggal dalam akses ke modal manusia yang sama.[58]

[58] Muhammed Wahed, Sishadiyati, and Niniek Imaningsih, *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teori Dan Studi Empiris* (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2021). Hlm. 156-158

Secara teori, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dan kesehatan membentuk modal manusia yang lebih baik, meningkatkan kemampuan teknis serta produktivitas individu. Produktivitas yang lebih tinggi kemudian diterjemahkan oleh pasar tenaga kerja menjadi upah yang lebih besar atau kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas SDM yang unggul menentukan kemampuan suatu daerah atau negara dalam mengadopsi teknologi baru dan mengembangkan kegiatan ekonomi bernilai tambah. Dampaknya, tercipta lebih banyak lapangan kerja dengan penghasilan layak yang akan mengurangi ketimpangan. Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendaptan harus dilakukan secara bersamaan, yaitu dengan meningkatkan mutu SDM sekaligus memperluas pemerataan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat.[59]

5. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau kehilangan sumber penghasilan. Menyebabkan pendapatan rumah tangga menurun dan memperlebar kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Jika pengangguran berlangsung lama, kemampuan masyarakat

[59] Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Indonesia: Erlangga, 2006). Hlm. 9-11

untuk berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan juga akan menurun, sehingga menghambat mobilitas ekonomi kelompok berpenghasilan rendah. Akibatnya, ketimpangan pendapatan akan terus berlanjut. Deperlukan kebijakan fiskal dan ketenagakerjaan seperti penciptaan lapangan kerja, program bantuan sosial, subsidi upah, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang berdampak pada pemerataan distribusi pendapatan. Dengan, menurunkan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang inklusif dapat menjadi langkah efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Secara teori, pembangunan ekonomi menempatkan pengurangan pengangguran sebagai salah satu tujuan utama untuk menekan ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan kesempatan kerja akan menambah pendapatan masyarakat secara langsung, dan membantu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, misalnya melalui kenaikan upah bagi kelompok berpendapatan rendah dan berkurangnya ketergantungan pada bantuan sosial. Namun, hubungan antara pengangguran dan ketimpangan tidak selalu berjalan searah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat menurunkan tingkat pengangguran, tetapi tetap memperlebar kesenjangan pendapatan, terutama jika pekerjaan yang tercipta bersifat berpenghasilan rendah atau tidak merata antarwilayah. Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu memperhatikan kualitas pekerjaan yang tersedia, akses terhadap pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta kebijakan

redistribusi pendapatan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada pemerataan kesejahteraan.[60]

B. Kajian Terdahulu

Tabel 2.4

Kajian Terdahulu

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelian	Persamaan	Perbedaan
1	Lois Lasyana Narwastu, (2015), Analisis Kausalitas Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah	Kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 2013.	Sama-sama meneliti Kualitas SDM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan	Dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 - 2013, dengan tambahan variabel pertumbuhan ekonomi

[60] Fitri Amalia et al., *Ekonomi Pembangunan*, ed. Ria Kusumaningrum (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020). Hlm 70-76

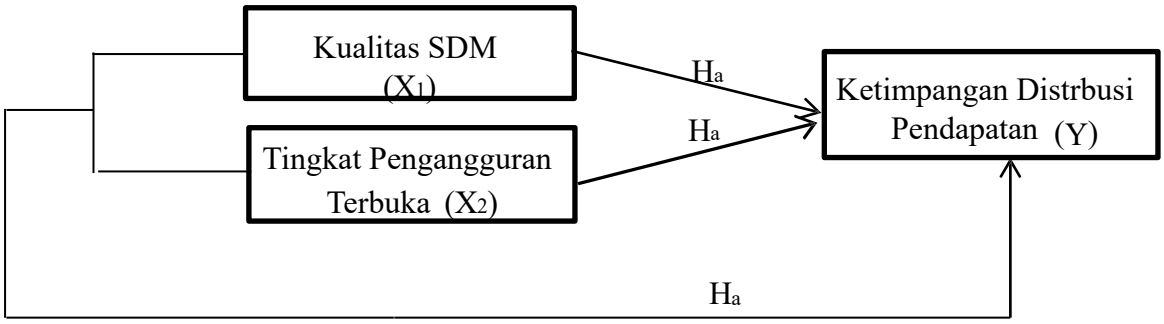
	Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013			
2	Riza Umaroh, (2019), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur	Pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur	Sama-sama meneliti Kualitas SDM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan	Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan tambahan variabel pertumbuhan ekonomi
3	Ari Darma Yanto, (2020), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran	Indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap	Sama-sama meneliti TPT, IPM terhadap ketimpangan pendapatan.	Dilakukan di Provinsi Jawa Timur periode 2013–2017 dengan tambahan variabel

	Terbuka, Serta Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur Tahun 2013-2017	ketimpangan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Timur.		pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk
4	Fatimah, (2022), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan,	Sama-sama meneliti pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota.	Dilakukan di Provinsi Jawa Timur periode 2014–2019, menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal

	Timur Tahun 2014-2019	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan dan arahnya negatif		
5	Ratiarum Fatika Yoertiara , (2022), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan IPM menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	Sama-sama meneliti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan.	Dilakukan pada tingkat provinsi di Pulau Jawa dengan menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi

6	Siti Naeni Nur Khaeni, (2023), Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, investasi berpengatuh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, TPT berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	Sama-sama meneliti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan	Dilakukan pada tingkat nasional di Indonesia dan menambahkan variabel investasi sebagai faktor penentu ketimpangan

C. Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sesuai dengan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh kualitas SDM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

   H_0 : Kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

   H_a : Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

2. Pengaruh tingkat prngangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

H_0 : Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

H_a : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

3. Pengaruh kualitas SDM dan kualitas SDM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

   H_0 : Kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

   H_a : Kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (*quantitative method*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antarvariabel yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengetahui keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya serta menganalisis sejauh mana suatu variabel dapat memengaruhi variabel lain, sehingga pengaruh yang terjadi dapat diprediksi dan dijelaskan secara sistematis.[61] Dalam penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui instrumen terstruktur seperti kuesioner, tes, lembar observasi, yang valid dan reliabel, sampel dipilih dengan teknik yang memungkinkan penarikan kesimpulan ke populasi.[62]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, selama lima tahun terakhir yaitu 2020-2024. Adapun waktu dalam pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober hingga selesai.

---

[61] Zaki Mubarak, *Penelitian Kuantitatif Dan Statistik Pendidikan: Cara Praktis Meneliti Berbasis Contoh Aplikatif Dengan SPSS,* Tasikmalaya: CV. Pustaka Turats Press, 2022, hal 73

[62] Suharsimi Arikunto, Suhardojono, and Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas*, ed. Suryani (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015). Hlm. 31

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain yang diperoleh dari berbagai sumber seperti statistik pemerintah, arsip lembaga, laporan penelitian terdahulu, artikel jurnal.[63] Data sekunder dalam penelitian ini berupa data panel, yaitu kombinasi antara *data time series* dan *data cross section*. Data *time series* menggambarkan informasi dari satu unit pengamatan yang dicatat pada beberapa kurun waktu, data *time series* dalam penelitian ini terlihat dari rentang waktu penelitian yaitu tahun 2020–2024 sedangkan data *cross section* memuat data dari satu atau beberapa unit pada satu periode yang sama, data *cross section* terlihat dari objek penelitian yang terdiri dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan data panel dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan hanya menggunakan data time series atau cross section saja. Data panel dapat menunjukkan perubahan kondisi setiap kabupaten/kota dari tahun ke tahun, sekaligus memperlihatkan perbedaan antar daerah dalam periode yang sama.[64]

Dengan menggunakan data panel, penelitian ini dapat menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara lebih akurat karena data

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 4

[64] Agus Tri Bas and Uki, *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)* (Yogyakarta: UMY, 2021). Hlm. 17

yang digunakan lebih banyak, lebih bervariasi, dan mampu menggambarkan kondisi masing-masing kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat selama periode penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang mencerminkan kualitas SDM, Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) dan *ratio gini* sebagai indikator yang mendeskripsikan ketimpangan distribusi pendapatan dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah sifat, karakteristik, atau aspek tertentu dari orang, benda, kejadian, atau kondisi yang dapat diukur atau diamati dan menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Variabel adalah apa yang diteliti untuk melihat perbedaan atau hubungan antar hal.[65]

1. Variabel independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang diasumsikan menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel, adapun vartiabel independent (X) dalam penelitian ini adalah:

[65] Benny Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Media Edu Pustaka, n.d.). hlm. 65

a. Kualitas SDM (X1), Kualitas sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dipilih karena dapat menggambarkan kualitas penduduk melalui tiga dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Nilai IPM dinyatakan dalam bentuk indeks dengan skala 0–100. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), Tingkat Pengangguran Terbuka diukur menggunakan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Variabel X2 dinyatakan dalam bentuk persen (%). Semakin tinggi nilai Tingkat Pengangguran Terbuka, maka semakin banyak penduduk usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi hasil atau akibat dalam hubungan penelitian yaitu variabel yang nilainya berubah karena dipengaruhi variabel lain, adapun variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan distribusi pendapatan diukur menggunakan rasio gini atau *gini ratio* pada masing-masing kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. *Gini ratio* dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan

semakin mendekati angka 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin timpang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

   Studi literatur (studi kepustakaan) merupakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, dan karya-karya penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui metode studi literatur, peneliti berupaya menemukan teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan landasan atau pembanding bagi penelitian yang sedang dilakukan.[66]

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan berbagai data tertulis yang berisi informasi, penjelasan, dan pemikiran mengenai suatu fenomena yang masih relevan serta berkaitan langsung dengan masalah penelitian.[67] Dokumentasi umumnya digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari beragam sumber, baik yang bersifat individual maupun berasal dari institusi atau lembaga.[68]

---

[66] Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2008). Hlm. 7

[67] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021). Hlm. 24

[68] Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hlm. 67

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono, statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengolah data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau berlaku secara luas. Dengan demikian, statistika deskriptif dapat diartikan sebagai cabang ilmu statistika yang mempelajari teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami. Statistika deskriptif berfokus pada pemberian uraian, penjelasan, atau gambaran mengenai suatu data maupun kondisi tertentu. Oleh karena itu, fungsi utamanya adalah menjelaskan keadaan, gejala, atau permasalahan yang sedang diteliti. Apabila terdapat penarikan kesimpulan, maka kesimpulan tersebut hanya berlaku untuk data yang dianalisis dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.[69]

2. Estimasi Model Data Panel

Dalam melakukan estimasi model regresi menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan sebagai metode analisis.[70]

a. *Common Effect Model* (CEM)

---

[69] Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS,* (Ponorogo: CV. Wade Group, 2017, hlm. 37

[70] Agus Tri Basuki, *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021), hlm. 6

Common Effect Model (CEM) merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak memperhatikan perbedaan waktu maupun karakteristik masing-masing individu atau perusahaan, sehingga diasumsikan bahwa seluruh perusahaan memiliki perilaku yang sama pada setiap periode pengamatan. Estimasi model ini umumnya dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang menganggap adanya perbedaan karakteristik antarindividu atau perusahaan yang tercermin pada nilai intersepnya. Untuk menangkap perbedaan tersebut, model ini menggunakan variabel dummy sehingga setiap perusahaan dapat memiliki intersep yang berbeda. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti budaya kerja, sistem manajemen, maupun pemberian insentif. Meskipun demikian, nilai slope pada semua perusahaan tetap dianggap sama. Metode ini sering disebut sebagai *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

c. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) digunakan untuk mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa komponen kesalahan (*error*) dapat saling berkaitan antarwaktu maupun antarindividu. Dalam model ini, perbedaan intersep antarperusahaan dimasukkan ke dalam komponen

error masing-masing. Salah satu keunggulan model Random Effect adalah kemampuannya dalam mengurangi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) atau metode *Generalized Least Square* (GLS).

3. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Setelah tahap pemilihan model dilakukan, langkah berikutnya adalah menentukan model yang paling sesuai melalui serangkaian pengujian. Beberapa jenis pengujian yang digunakan dalam proses ini antara lain sebagai berikut:[71]

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* berfungsi untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1) H0: Diterima dengan menggunakan model CEM, jika nilai probabilitas Chi-square > 0,05
2) Ha: Diterima dengan menggunakan model FEM, jika nilai probabilitas Chi-square < 0,05

b. Uji *Hausman*

Setelah uji *Chow* langkah berikutnya adalah melakukan uji *Hausman*. Uji *hausman* bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai digunakan, yaitu antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random*

[71] Anwar Muhammad Nursan, *Buku Ajar Analisi Regresi Data Panel Dengan Aplikasi Eviews*, (Mataram: Pustaka Bangsa (IKAPI), 2025), hlm. 31-34

Effect Model (REM). Adapun hipotesis pada uji *hausman* adalah sebagai berikut:

1) H0: Diterima dengan menggunakan model *Random Effect Model* (REM), jika nilai probabilitas Chi-square > 0,05
2) Ha: Diterima dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), jika nilai probabilitas Chi-square < 0,05

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji *lagrange multiplier* dilakukan apabila hasil uji *chow* menunjukkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih sesuai, sedangkan hasil uji *hausman* memilih *Random Effect Model* (REM). jika hasil uji *chow* dan uji *hausman* sama-sama menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling tepat, maka uji *lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan. Dengan hipotesis sebagai berikut:

1) H0: Diterima dengan menggunakan model *Common Effect Model* (CEM), jika nilai probabilitas Breusch-Pagan > 0,05
2) Ha: Diterima dengan menggunakan model *Random Effect Model* (REM), jika nilai probabilitas Breusch-Pagan < 0,05

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji *Normalitas*

Menurut Ghozali uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data penelitian pada setiap variabel memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dasar dalam menentukan keputusan adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai Prob. Jarque-Bera > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal
2) Jika nilai Prob. Jarque-Bera < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal

b. Uji *Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat kolerasi di antara variabel- variabel independen.[72] Dasar penentuan keputusan pada uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua indikator, yaitu:

1) Nilai koefisien korelasi masimg-masimg variabel independen < 0,8 maka terbebas dari multikolonearitas.
2) Nilai koefisien korelasi masimg-masimg variabel independen > 0,8 maka terdapat gejala multikolonearitas.

c. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan variasi nilai residual dalam model regresi. Model regresi

[72] Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPPS* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). Hlm 112

yang baik ditandai dengan tidak adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glesjer, hal ini dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai residualnya (ABS_RES). Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada :

1) Jika nilai probability > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2) Jika nilai probability < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Uji *Autokorelasi*

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t–1. Apabila hubungan tersebut muncul, maka model mengalami masalah autokorelasi, sebab model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Menurut Ghozali, autokorelasi dapat muncul karena data penelitian disusun secara berurutan berdasarkan waktu sehingga saling berkaitan. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi adalah melalui uji Durbin-Watson.[73]

[73] Duli. Hlm 114

Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan Uji DurbinWatson adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. DU< DW<4-DU, tidak terjadi autokolerasi
b. DW<DL atau DW>4-DL, terjadi autokolerasi
c. DL<DW< atau 4-DU<4-DL, tidak ada kesimpulan pasti[74]

5. Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan kombinasi antara *data time series* dan *data cross section*. Data *time series* menggambarkan informasi dari satu unit pengamatan yang dicatat pada beberapa kurun waktu, data *time series* dalam penelitian ini terlihat dari rentang waktu penelitian yaitu tahun 2020–2024 sedangkan data *cross section* memuat data dari satu atau beberapa unit pada satu periode yang sama, data *cross section* terlihat dari objek penelitian yang terdiri dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan data panel dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan hanya menggunakan data time series atau cross section saja. Data panel dapat menunjukkan perubahan kondisi setiap kabupaten/kota dari tahun ke tahun, sekaligus memperlihatkan perbedaan antar daerah dalam periode yang sama.

[74] Priyastama Romie, *The Book Of SPSS Analisis & Pengelolaan Data*,(Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hal 131

Adapun persamaan regresi data panel pada penelitian ini adalah:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \ldots + e}$$

keterangan:

Y = Ketimpangan distribusi pendapatan

α = Konstanta

X_1 = Kualitas SDM

X_2 = Tingkat Pengangguran Terbuka

β = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = Error term

6. Uji *Koefisien Determinasi* (*Adjusted* R^2)

Menurut Ghozali Koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar persentase variasi pada variabel independen dalam model dapat menerangkan variasi pada variabel dependen. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) menilai sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) berada dalam rentang 0 hingga 1. [75]

a. Apabila hasil R mendekati 0 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak.

[75] Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). Hlm 140-141

b. Apabila hasil R mendekati 1 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan kuat.

7. Uji Hipotesis

a. Uji *Parsial* (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

Pengujian berdasarkan nilai signifikansi:

1) Jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y)
2) Jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima maka, terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap varibel dependent (Y)

Pengujian berdasarkan nilai t hitung dan t tabel:

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap varibel dependent (Y)
2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap varibel dependent (Y)

b. Uji *Simultan* (Uji f)

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara simultan (secara bersama-sama) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan pada penelitian yang memiliki dua variabel independent atau lebih.[76]Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

Pengujian berdasarkan nilai signifikansi:

1) Jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap variabel dependent (Y)
2) Jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima maka, terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap varibel dependent (Y)

Pengujian berdarkan nilai f hitung dan f tabel:

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap varibel dependent (Y)
2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap varibel dependent (Y)

[76] Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2),* (Indonesia: Guapedia, 2021). Hlm. 41

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gaambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra yang dikenal sebagai wilayah asal masyarakat Minangkabau dan Mentawai. Kawasannya meliputi pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan, hingga sejumlah pulau di lepas pantai seperti Kepulauan Mentawai. Sejarah daerah ini tidak terlepas dari perkembangan budaya dan peradaban Minangkabau yang telah berlangsung sejak masa prasejarah. Pada abad ke-14, Kerajaan Pagaruyung berkembang sebagai pusat kekuasaan yang berperan penting dalam membentuk identitas politik dan budaya masyarakat Minangkabau. Memasuki awal abad ke-19, wilayah ini mengalami Perang Padri (1803–1838), sebuah konflik yang kemudian membuka jalan bagi campur tangan kolonial Belanda dan membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan setempat.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Sumatera Barat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Dalam perkembangan administrasi berikutnya, Provinsi Sumatera dibagi menjadi beberapa wilayah, dan Sumatera Barat bersama Riau serta Jambi tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah kemudian dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Pada saat yang sama, beberapa wilayah mengalami penyesuaian administratif, seperti Kerinci yang bergabung dengan Provinsi Jambi, serta Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi yang masuk ke Provinsi Riau. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/G/PD/1958 tanggal 29 Mei 1958, ibu kota Provinsi Sumatera Barat resmi dipindahkan ke Kota Padang, yang hingga kini menjadi pusat pemerintahan provinsi.

2. Keadaan Geografis Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera pada koordinat 0°54’ Lintang Utara hingga 3°30’ Lintang Selatan dan 98°36’ hingga 101°53’ Bujur Timur. Wilayah ini dilalui oleh garis khatulistiwa yang melintas di Bonjol, Kabupaten Pasaman. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, luas wilayah Sumatera Barat mencapai sekitar 42.119,54 km² yang mencakup wilayah daratan dan kepulauan. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau di sebelah utara, Provinsi Jambi dan Bengkulu di sebelah timur, serta Samudera Hindia di sebelah barat dan Selatan.

Provinsi Sumatera Barat dilintasi oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0° yang berada di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Letak tersebut menyebabkan Sumatera Barat memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata sekitar 25,78°C, tingkat kelembaban yang relatif tinggi mencapai 86,67%, serta tekanan udara rata-rata sebesar 994,69 mb. Kondisi geografis ini juga memengaruhi variasi bentang alam wilayahnya

yang sangat beragam, mulai dari daerah pesisir dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan laut hingga kawasan pegunungan yang memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan ketinggian wilayahnya, sebagian besar area Sumatera Barat berada pada rentang 500–1.000 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 1.357.045 hektare atau 32,07% dari total wilayah. Sementara itu, kawasan dengan ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut mencakup 1.286.793 hektare (30,41%), wilayah berketinggian 100–500 meter mencapai 643.552 hektare (15,21%), dan daerah pada ketinggian 1.000–1.500 meter seluas 767.117 hektare (18,13%). Adapun wilayah dengan ketinggian 1.500–2.000 meter tercatat seluas 113.116,6 hektare (2,67%), sedangkan sisanya merupakan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Variasi ketinggian tersebut menjadikan Sumatera Barat memiliki karakteristik topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan.

3. Kondisi Topografi Provinsi Sumatera Barat

Kondisi topografi Proninsi Sumatera Barat didominasi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan karena dilalui oleh rangkaian Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan. Wilayah ini memiliki sekitar 29 gunung yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, dengan Gunung Kerinci sebagai puncak tertinggi yang berada di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Selain itu, terdapat

beberapa gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Talang, dan Gunung Tandikat. Di samping kawasan pegunungan, Sumatera Barat juga memiliki dataran rendah yang membentang di sepanjang pesisir barat. Kekayaan alam lainnya terlihat dari keberadaan sejumlah danau, seperti Danau Singkarak yang merupakan danau terluas di provinsi ini, Danau Maninjau di Kabupaten Agam, serta Danau Talang, Danau Di Atas, dan Danau Di Bawah di Kabupaten Solok. Provinsi ini juga dialiri oleh berbagai sungai besar, baik yang bermuara ke pantai timur Pulau Sumatera maupun ke pesisir barat. Dengan iklim tropis, suhu udara di Sumatera Barat umumnya berkisar antara 22,6°C hingga 31,5°C. Selain wilayah daratan, Sumatera Barat juga memiliki kawasan kepulauan yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.

4. Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat

Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yang unik karena memadukan sistem pemerintahan nasional dengan sistem adat Minangkabau yang masih kuat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hingga tahun 2024, Sumatera Barat terdiri atas 19 kabupaten dan kota, yaitu 12 kabupaten dan 7 kota. Seluruh wilayah tersebut terbagi menjadi 179 kecamatan yang berfungsi sebagai unit pemerintahan antara kabupaten/kota dengan pemerintahan tingkat bawah.

Keunikan administrasi Sumatera Barat terlihat pada penggunaan sistem nagari sebagai satuan pemerintahan terendah di wilayah kabupaten.

Nagari tidak hanya berfungsi sebagai unit pemerintahan, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai budaya Minangkabau. Pada tahun 2023 tercatat terdapat 909 nagari yang tersebar di berbagai kabupaten. Sementara itu, wilayah perkotaan menggunakan sistem kelurahan dengan jumlah sekitar 230 kelurahan serta 126 desa. Selain pembagian administratif tersebut, masyarakat Sumatera Barat juga mengenal satuan sosial budaya seperti jorong, korong, dan dusun yang berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, peran tokoh adat atau ninik mamak tetap dipertahankan dan bekerja sama dengan wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan, sehingga mencerminkan kuatnya integrasi antara sistem pemerintahan formal dan adat di Sumatera Barat.

5. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat

Adapun Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"

Adapun Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafa "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulllah"

b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi

d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah

e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

B. Hasil Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Dalam uji statistik deskriptif menghasilkan deskripsi dari data yang digunakan sehingga menjadikan informasi lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data ketimpangan distribusi pendapatan (Y), kualitas SDM (X_1) dan tingkat pengangguran terbuka (X_2). Berikut hasil uji statistik deskriptif menggunakan EViews 12.

Tabel 4.1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	X1	X2	Y
Mean	74,61526	5,449895	0,272874
Median	73,67000	5,040000	0,269000
Nilai Maksimum	84,38000	13,64000	0,394000

Nilai Minimum	63,71000	1,330000	0,194000
Standar Deviasi	4,706138	2,067101	0,033481

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa:

a. Kualitas SDM

Diketahui bahwa variabel kualitas SDM memiliki nilai minimum sebesar 63,71% yang terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum sebesar 84.38% terdapat pada Kota Padang pada tahun 2024. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 74.61%, nilai tengah (*median*) variabel kualitas SDM adalah 73,67%, dan standar deviasi sebesar 4,70%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Diketahui bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai minimum sebesar 1,33% yang terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023. Sedangkan nilai maksimum sebesar 13,64% terdapat pada Kota Padang pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5,44%, nilai tengah (*median*) variabel tingkat pengangguran terbuka 5,04%, dan standar deviasi sebesar 0,03%.

c. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Diketahui bahwa variabel ketimpangan distribusi pendapatan memiliki nilai minimum sebesar 0,194 yang terdapat pada

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,394 terdapat pada Kota Padang Panjang pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,27, nilai tengah (*median*) variabel ketimpangan distribusi pendapatan adalah 0,27, dan standar deviasi sebesar 0,033.

2. Estimasi Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan tiga jenis estimasi, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan metode estimasi terbaik dilakukan melalui uji yang meliputi *Chow test*, *Hausman test*, dan *Lagrange Multiplier test*.

3. Uji Model

Pemilihan metode estimasi model data panel dilakukan melalui uji yang meliputi *Chow test*, *Hausman test*, dan *Lagrange Multiplier test*.

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* berfungsi untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1) H0: Diterima dengan menggunakan model CEM, jika nilai probabilitas *Chi-square* > 0,05
2) Ha: Diterima dengan menggunakan model FEM, jika nilai probabilitas *Chi-square* < 0,05

Tabel 4.2

Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.977486	(18,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	85.282682	18	0.0000

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas *cross-section Chi-square* sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Karena *Fixed Effect Model* yang terpilih maka harus dibandingkan dengan melakukan uji *hausman*. Jika yang terpilih *Common Effect Model* maka langsung saja ke uji *language multiplier*, untuk membandingkan *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*.

b. Uji Hausman

Uji *hausman* bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai digunakan, yaitu antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Adapun hipotesis pada uji *hausman* adalah sebagai berikut:

1) H0: Diterima dengan menggunakan model *Random Effect Model* (REM), jika nilai probabilitas Chi-square > 0,05

2) Ha: Diterima dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), jika nilai probabilitas Chi-square < 0,05

Tabel 4.3

Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.025927	2	0.0000

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan hasil uji Hausman pada Tabel 4.3, diperoleh nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,0000 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Maka tidak perlu melakukan uji *lagrange multiplier* karena sudah dipastikan bahwa model yang lebih tepat adalah FEM dibandingkan REM.

4. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Model CEM dan FEM diestimasi menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS), sedangkan model REM menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS). Pada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas bukan syarat untuk memperoleh estimator yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator*

(BLUE). Oleh karena itu, jika model yang terpilih adalah CEM atau FEM, maka uji asumsi klasik yang perlu dilakukan hanya uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Jika model yang terpilih adalah REM, uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan karena metode GLS telah mampu mengatasi beberapa pelanggaran asumsi klasik.[77]

Berdasarkan uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan model yang terbaik dalam penelitian ini adalah adalah FEM, maka uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang yang perlu dilakukan dalam regresi data panel dengan pendekatan OLS hanya uji multikolonearitas dan uji heteroskedastisitas sedangkan uji normalitas tidak perlu dilakukan karena dalam regresi data panel dengan pendekatan OLS tetap konsisten meskipun data tidak berdistribusi normal.[78]

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi di antara variabel-variabel independen. Syarat pengambilan keputusannya dalam regresi data panel adalah:[79] [80]

1) Nilai koefisien korelasi masimg-masimg variabel independen < 0,80 maka terbebas dari multikolonearitas.

[77]Nachrowi Djalal dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia, 2006), hlm. 183

[78] Runggu Basmandala Napitupulu, dkk, *Penelitian Bisnis dan Teknik Analisis Data dengan SPSS, Stata, Eviews*, (Sumatera Utara: Madenatera, 2021), hlm 120

[79] Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua*, (Yogyakarta:Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 114

[80] Anwar Muhammad Nursan, *Buku Ajar Regresi Data Panel Dengan Aplikasi Eviews*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2025), hlm. 36

2) Nilai koefisien korelasi masimg-masimg variabel independent > 0,80 maka terdapat gejala multikolonearitas.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation	X1	X2
X1	1.000000	
X2	0.546203	1.000000

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa nilai korelasi X_1 dan X_2 adalah 0,546203 < 0,80. maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independent tidak terjadi multikoloneritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan variasi nilai residual dalam model regresi. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya heteroskedastisitas. Dasar dalam menentukan keputusan adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai probability > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2) Jika nilai probability < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007512	0.122331	0.061407	0.9512
X1	1.54E-05	0.001595	0.009665	0.9923
X2	0.000864	0.001442	0.598930	0.5510

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas hasil uji heteroskedastisitas pada *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel X_1 memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9923 dan variabel X_2 sebesar 0,5510. Dimana kedua nilai dari masing-masinng variabel independent > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t–1. Syarat pengambilan keputusannya adalah:

1) DU< DW<4-DU, tidak terjadi autokolerasi
2) DW<DL atau DW>4-DL, terjadi autokolerasi
3) DL<DW< atau 4-DU<4-DL, tidak ada kesimpulan pasti

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokolerasi

R-squared	0.704938	Mean dependent var	0.272874
Adjusted R-squared	0.625192	S.D. dependent var	0.033481
S.E. of regression	0.020498	Akaike info criterion	-4.744701
Sum squared resid	0.031092	Schwarz criterion	-4.180160
Log likelihood	246.3733	Hannan-Quinn criter.	-4.516584
F-statistic	8.839758	Durbin-Watson stat	2.185788
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,185788. Dengan nilai signifikansi 0,05 dengan jumlah data dari data panel 19 kabupaten/kota selama 5 tahun maka:

DW = 2,185788

N = 95

K = 2 (2 variabel independent)

Tabel Durbin Watson :

DU = 1.7091

DL = 1.6233

4-DU = 2,2909

4-DL = 2,3767

Sehingga diperoleh kesimpulan DU < DW < 4-DU atau 1.7091 < 2,185788 < 2 .3767 maka data tidak terjadi autokolerasi pada model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM).

5. Analisis Regresi Data Panel

Dalam estimasi regresi data panel, model yang paling sesuai untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengolahan data dengan menggunakan model FEM dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Estimasi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.057500	0.214921	4.920404	0.0000
X1	-0.010527	0.002802	-3.756521	0.0003
X2	0.000157	0.002534	0.061933	0.9508

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.7 bentuk persamaan regresi yang dihasilkan dari estimasi menggunakan *Random Effect Model* (REM) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots.. + e}$$

$$Y = 1{,}057500 + (-0{,}010527)\ X1 + 0{,}000157\ X2 + e$$

keterangan:

Y = Ketimpangan distribusi pendapatan

α = Konstanta

X1 = Kualitas SDM

X_2 = Tingkat Pengangguran Terbuka

β(1,2…) = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = Error term

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat disimpilkan:

a. Nilai *constant* 1,0575 yang menyatakan jika variabel Kualitas SDM (X1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) memiliki nilai tetap atau sama dengan nol, maka ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebesar 1,0575.

b. Kualitas SDM (X1) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y)

   Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai -0,010527 berarti bahwa variabel kualitas SDM berpengaruh negatif dan setiap kenaikan 1% kualitas SDM maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami penrunan sebesar -0,010527 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y)

   Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai 0,000157 berarti bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran terbuka maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 0,000157 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

d. Kualitas SDM (X1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y)

Berdasarkan nilai koefisien regresi variabel kualitas SDM (X1) sebesar -0,010527 dan nilai koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) sebesar 0,000157. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas SDM (X1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) mengalami kenaikan dan penurunan dengan asumsi variabel independent yang lain konstan.

6. Uji *Koefisien Determinasi* (*Adjusted* R^2)

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) menilai sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) berada dalam rentang 0 hingga 1. [81]

a. Apabila hasil R mendekati 0 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak.
b. Apabila hasil R mendekati 1 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan kuat.

[81] Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*. Hlm 140-141

Tabel 4.8

Uji *Koefisien Determinasi* (*Adjusted* R^2)

R-squared	0.704938	Mean dependent var	0.272874
Adjusted R-squared	0.625192	S.D. dependent var	0.033481
S.E. of regression	0.020498	Akaike info criterion	-4.744701
Sum squared resid	0.031092	Schwarz criterion	-4.180160
Log likelihood	246.3733	Hannan-Quinn criter.	-4.516584
F-statistic	8.839758	Durbin-Watson stat	2.185788
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-squared 0,625192 atau 62,5192%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari kualitas SDM (X1) dan tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan memiliki kontibusi yang besar terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Sedangkan sisanya 37,4808% (100 - nilai adjusted R-squared), dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini, dimana variabel lain berupa pertumbuhan ekonomi, investasi, yang mempengaruhi ketimpangan distibusi pendapatan.

7. Uji Hipotesis

a. Uji *Parsial* (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan pada derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 0,05). Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

Pengujian berdasarkan nilai signifikansi:

1) Jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y)
2) Jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima maka, terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap varibel dependent (Y)

Pengujian berdasarkan nilai t hitung dan t tabel:

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap varibel dependent (Y)
2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap varibel dependent (Y)

Tabel 4.9

Uji *Parsial* (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.057500	0.214921	4.920404	0.0000
X1	-0.010527	0.002802	-3.756521	0.0003
X2	0.000157	0.002534	0.061933	0.9508

Sumber: Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa:

1) Kualitas SDM (X1) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y)

Variabel kualitas SDM (X1) memiliki t-statistic (t hitung) sebesar 3,756521 dengan nilai Prob. (signifikansi) sebesar 0,0003. Sementara untuk nilai t tabel diperoleh dari nilai dari:

df = (n-k-1) a = 5% = (0,05/2)

= (95-2-1) = 0,025

= 92

Maka ditemukan nilai t tabel nya dengan nilai a=5% sebesar 1.66159 dapat dilihat t-statistic (t hitung) > pada t tabel (3,756521 > 1.66159) dan nilai Prob. (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (0,0003 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan Ha diterima dengan kata lain bahwa secara parsial variabel Kualitas SDM (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y)

Variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki t-statistic (t hitung) sebesar 0,061933 dengan nilai Prob. (signifikansi) sebesar 0,9508. Sementara untuk nilai t tabel diperoleh dari:

df = (n-k-1) a = 5% = (0,05/2)

= (95-2-1) = 0,025

= 92

Maka ditemukan nilai t tabel nya dengan nilai a=5% sebesar 1.66159 dapat dilihat t-statistic (t hitung) < pada t tabel (0,061933 <

1.66159) dan nilai Prob. (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (0,9508 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan Ha diterima dengan kata lain bahwa secara parsial variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

b. Uji *Simultan* (Uji f)

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara simultan (secara bersama-sama) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan pada penelitian yang memiliki dua variabel independent atau lebih.[82] Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

Pengujian berdasarkan nilai signifikansi:

1) Jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap variabel dependent (Y)
2) Jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima maka, terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap varibel dependent (Y)

Pengujian berdarkan nilai f hitung dan f tabel:

[82] Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2),*. Hlm. 41

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap varibel dependent (Y)
2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) secara simultan terhadap varibel dependent (Y)

Tabel 4.10

Uji *Simultan* (Uji F)

R-squared	0.704938	Mean dependent var	0.272874
Adjusted R-squared	0.625192	S.D. dependent var	0.033481
S.E. of regression	0.020498	Akaike info criterion	-4.744701
Sum squared resid	0.031092	Schwarz criterion	-4.180160
Log likelihood	246.3733	Hannan-Quinn criter.	-4.516584
F-statistic	8.839758	Durbin-Watson stat	2.185788
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Ouput eviews 12, Data Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh f hitung (F-statistic) 8,839758 dengan nilai signifikansi atau nilai Prob.(F-statistic) sebesar 0,000000. Sedangkan untuk f table dengan tingkat kesalahan 5 %, diperoleh:

df (N1) = (k-1) = (2-1) = 1

df (N2) = (n-k) = (95-2) = 93

Maka f tabelnya adalah sebesar 3,940. Maka disimpulkan bahwa f hitung > f tabel (8,839758 > 3,940) dan nilai signifikansi atau nilai Prob.(F-statistic) lebih kecil dari 0,05 (0,000000<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain bahwa secara simultan variabel kualitas SDM (X1) dan variabel tingkat

pengangguran terbuka (X2) secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kualitas SDM terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) yang telah dilakukan dapat dilihat pada uji t, bahwa variabel kualitas SDM (X1) memiliki t-statistic (t hitung) sebesar -3,756521 dengan nilai Prob. (signifikansi) sebesar 0,0003. Dimana nilai Prob. (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (0,0003 < 0,05) dan t-statistic (t hitung) > t tabel (3,756521 > 1.66159). Sehingga H_0 ditolak dan Ha diterima dengan kata lain bahwa variabel kualitas SDM (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Koefisien regresi sebesar -0,010527 menunjukkan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya, setiap peningkatan kualitas SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,010527 dengan asumsi variabel lain tetap/konstan (*cateris paribus)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak mampu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik, kondisi kesehatan yang lebih baik,

dan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan produktif serta pendapatan yang lebih tinggi. Ketika akses terhadap pendidikan dan kesehatan semakin merata, maka kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup juga semakin merata sehingga ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan keterampilan merupakan bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Dalam teori *human capital* dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh pendapatan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM akan mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Simon Kuznets. Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap pembangunan yang lebih maju, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan produktivitas akan membantu menurunkan ketimpangan pendapatan. Maka pembangunan manusia yang semakin merata akan memperluas kesempatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Temuan ini relevan dengan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang penelitian, dimana beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas SDM tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kualitas SDM memiliki posisi yang sangat penting karena Islam mendorong umatnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu upaya mewujudkan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga akal (hifz al-'aql) dan menjaga kehidupan (hifz an-nafs). Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mampu memperoleh penghasilan yang layak dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Islam juga menekankan prinsip keadilan (al-'adl) dalam kehidupan ekonomi. Ketika kualitas SDM meningkat secara merata, maka kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendapatan juga akan semakin merata. Ketika kualitas SDM meningkat maka kemampuan manusia untuk mendistribusikan kekayan melalui instrument zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga ikut meningkat sehingga tidak terjadi pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu. Dimana sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas

SDM dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Riza Umaroh (2019) yang menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Artinya, meningkatnya kualitas SDM, maka akan diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, penelitian Siti Naeni Nur Khaeni (2023) juga memperkuat temuan penelitian dimana menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kemudian diperkuat juga oleh Ratiarum Fatika Yoertiara (2022), menemukan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-prvinsi di pulau Jawa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM secara konsisten mampu menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai wilayah.

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) yang telah dilakukan dapat dilihat pada uji t, bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki t-statistic (t hitung) sebesar 0,061933 dengan nilai Prob. (signifikansi) sebesar 0,9508. Dimana nilai Prob. (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (0,9508 < 0,05) dan t-statistic (t hitung) > t tabel (0,061933 < 1.66159). Sehingga H_0 diterima dan Ha ditolak dengan kata lain bahwa

variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Koefisien regresi sebesar 0,000157 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki arah hubungan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya, peningkatan tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun karena pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, maka perubahan tingkat pengangguran terbuka belum mampu menjelaskan perubahan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori makroekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith. Menurut Todaro dan Smith, tingginya tingkat pengangguran akan memperburuk distribusi pendapatan karena sebagian masyarakat kehilangan sumber pendapatan, sementara kelompok yang bekerja tetap memperoleh pendapatan. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat akan semakin besar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian pada teori dapat terjadi karena struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor informal dan sektor pertanian. Banyak penduduk yang secara statistik tidak bekerja pada sektor formal, tetapi tetap memperoleh pendapatan dari usaha keluarga, perdagangan kecil, kegiatan pertanian, atau pekerjaan tidak tetap

lainnya. Dengan demikian, meskipun tingkat pengangguran mengalami perubahan, kondisi tersebut tidak secara langsung menyebabkan perubahan ketimpangan distribusi pendapatan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, bekerja merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan karena menjadi sarana memperoleh rezeki yang halal dan meningkatkan kesejahteraan. Islam memandang pengangguran sebagai kondisi yang perlu diminimalkan karena dapat mengurangi produktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka belum menjadi faktor utama yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat mekanisme ekonomi dan sosial yang mampu menopang pendapatan masyarakat meskipun sebagian penduduk tidak bekerja secara formal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Naeni Nur Khaeni (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sejalan juga dengan penelitian Fatimah (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Riza Umaroh (2019), Ari Darma Yanto (2020) dan Ratiarum Fatika Yoertiara , (2022), yang menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Perbedaan hasil

ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, periode penelitian, struktur ekonomi daerah, serta kondisi pasar tenaga kerja pada masing-masing daerah penelitian.

3. Pengaruh Kualitas SDM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada uji F diperoleh f hitung (F-statistic) 8,839758 dengan nilai signifikansi atau nilai Prob.(F-statistic) sebesar 0,000000. Maka f hitung > f tabel (8,839758 > 3,940) dan nilai signifikansi atau nilai Prob.(F-statistic) lebih kecil dari 0,05 (0,000000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, bahwa secara simultan variabel kualitas SDM (X1) dan variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat 2020-2024. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) atau nilai adjusted R-squared sebesar 0,625192. Menunjukkan bahwa sekitar 62,5192% variabel independent yang terdiri dari kualitas SDM (X1) dan tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan memiliki kontibusi yang besar terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Sedangkan sisanya 37,4808% (100 - nilai adjusted R-squared), dipengaruhi variabel lain yang

tidak dibahas pada penelitian ini, dimana variabel lain berupa pertumbuhan ekonomi, investasi, yang mempengaruhi ketimpangan distibusi pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riza Umaroh (2019), Ratiarum Fatika Yoertiara (2022), Siti Naeni Nur Khaeni (2023), Ari Darma Yanto (2020), yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia atau IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara itu, hasil penelitian mengenai tingkat pengangguran terbuka yang tidak berpengaruh signifikan sejalan dengan penelitian Siti Naeni Nur Khaeni (2023) dan Fatimah (2022), yang menunjukkan bahwa pengangguran terbuka bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, kualitas SDM menjadi faktor yang lebih penting dalam menjelaskan perubahan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 2020–2024, maka dapat kesimpulan:

1. Kualitas SDM (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,0003 < 0,05 dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (3,756521 > 1,66159). Koefisien regresi sebesar -0,010527 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,010527 dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,9508 > 0,05 dan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (0,061933 < 1,66159). Koefisien regresi sebesar 0,000157 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,000157 dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan pada uji F bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (8,839758 > 3,940) serta nilai *Prob(F-statistic)* atau signifikansi sebesar 0,000000 < 0,05. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,625192 atau 62,5192% Menunjukkan bahwa sekitar 62,5192% variabel independent yang terdiri dari kualitas SDM (X1) dan tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan memiliki kontibusi yang besar terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Sedangkan sisanya 37,4808% (100 - nilai adjusted R-squared), dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini, dimana variabel lain berupa pertumbuhan ekonomi, investasi, yang mempengaruhi ketimpangan distibusi pendapatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat diiharapkan dapat lebih memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Serta pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendorong pengembangan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja, penguatan

kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan sektor ekonomi produktif yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik akan semakin terbuka sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Upaya dalam peningkatan kualitas SDM penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, investasi, serta fakotr lain yang berpotensi memengaruhetimpangan dsitribusi pendapatan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau wilayah penelitian yang lebih luas sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam. *Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas XI KTSP Standar Isi 2006*. Indonesia: Esis, 2007.

Amalia, Fitri, Roeskani Sinaga, Rahmah Farahdita Soeyatno, Dikson Silitonga, and Akhmad Solikin. *Ekonomi Pembangunan*. Edited by Ria Kusumaningrum. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*. Jakarta: INDOCAMP, 2018.

Anita, Titu Maria, Darsana, I MadLola Rahmadona, Sishadiyati, Ariani, Aris Triyono, Masruha, Misno, Herty Ramayanti Sinaga, and B Lena Nuryanti Sastradinata. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

Annisa, Nur, Abd. Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan." *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume* 7, no. 2 (2025): 234–48. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876.

Arikunto, Suharsimi, Suhardojono, and Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Edited by Suryani. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Armini, Maudina, Wahyu Hidayat Riyanto, Dwi Nur Azizah, and Zainal Arifin. *Dari Angka Menuju Makna Memahami Arah Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Arofah, M. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. Surabaya, 2017.

Ashari, Nesha Rizky, Syahrul Gunawan, W Irwan, and Kata Kunci. "Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 13, no. 2 (2024): 293–302. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139.

Awaliyah, Maharani, Octy Rizky Ramadhani, Adriyansyah Hermawan, Windi Meilani, Muhammad Al-Fath Ismail, Ilham Muhammad Tantowi, M. Ajril Faiz Mamduh, and Dian Herdiana. "Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 5 (2025): 340–49. https://doi.org/https:/doi.org/10.5281/zenodo.15667615.

Bas, Agus Tri, and Uki. *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta: UMY, 2021.

Darma, Budi. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2),*. Indonesia: Guapedia, 2021.

David, Kaluge, Marlina Ekawati Tyas Danarti Hascaryani, Nalle, and Frederic Winston. *Ekonometrika Terapan: Dari Klasik Hingga Machine Learning (Teori Dan Aplikasi)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2025.

Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPPS*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Fatimah. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Febriani, Ratu Eva, Boari Yoseb, I Nyoman Wahyu Widiana, Mulyadi Maswir, and Rusdy Setiawan. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edited by Weni Yuliani. Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia, 2025.

Hanifa Muslimah, Dewi Zaini Putri. “Pengaruh Aglomerasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Ketimpangan Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” *JKEP: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembanguan* 3, no. 3 (2021): 9–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12365.

Hardjanto, Imam. *Teori Pembangunan*. Malang: UB Press, 2011.

Hidayati, Hermin Nainggolan, Rezi Erdiansyah, Wahyu Setya Ratri, Eddy Supriyadinata Gorda, Ni luh Putu Eka Yudi Prastiwi, Sukemi Kadiman, Putu Agus Adnyana, and Bonataon Maruli Timothy Simandjorang. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

“Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2025/02/05/2408/Ekonomi-Indonesia-Tahun-2024-Tumbuh-5-03-Persen--c-to-c---Ekonomi-Indonesia-Triwulan-Iv-2024-Tumbuh-5-02-Persen--y-on-y---Ekonomi-Indonesia-Triwulan-Iv-2024-Tumbuh-0-53-Persen--q-to-q--.Html,” n.d.

Kalsum, Ummi. “Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam.” *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 41–59.

Kaluge, David, Tyas Danarti Hascaryani, Marlina Ekawati, and Frederic Winston Nalle. *Ekonomi Terapan:Dari Klasik Hingga Machine Learning (Teori Dan Aplikasi)*. Depok: Rajawali Press, 2025.

Khaeni, Siti Naeni Nur. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Konadi, Win, Musrizal, Asean, Kamaruddin, and Rahmad. *Penduduk Dan Pembangunan:Analisis Demografis Dan Empiris*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2025.

Kurniawan, Paulus, and Made Kembar Sri Budhi. *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.

Langoday, Thomas Ola. *Ekonomi Pembangunan: Membangun Negeri Unggul Dan Berperadaban*. Banyumas: Arta Media, 2024.

M.l, Jhingan. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2012.

Masruri. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah DI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

Muafiqie, Humaidah, Aslichah, Supriyanto, Tri Sulistyani, Wenselinus Nong Kardinus, Mohammad Jon Tasrif, Yogi Nurfauzi, Brigita ElisabetKR, Uran, and Emiliyan Mamuki. *Pengantar Ilmu Ekonomi Pendekatan Makro Dan Mikro*. Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023.

Muhammad Daffa Rifaldo, and Tri Wahyu Rejekiningsih. “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2015-2019.” *Diponegoro Journal Of Economics* 13, no. 2 (2024): 27. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djoe.43258.

Narwastu, Lois Lasyana. “Analisis Kausalitas Kualitas Sumber Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013,” 2015.

Pasaribu, Benny, Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, and Rizqon Halal Syah. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Media Edu Pustaka, n.d.

Rahman, Arif, M Syafii, and Sukma Hayati Hakim. *Kesejahteraan Dan Indikator Kunci Pembangunan*. Medan: Media Kreasi Group, 2021.

Rahmania, Meri. *Teori Ekonomi Makro*. Padang: CV Gita Lentera, 2025.

Rapanna, Patta, and Yana Fajriah. *Menembus Badai Ekonomi*. Makassar: CV Sah Media, 2018.

Rapii, Muhammad, Huzain Jailani, and Danang Prio Utomo. *Perekonomian Indonesia*. Jawa Barat: CV Jejak, 2022.

Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Rohmah, Wiji Rahayu Maratus Saidah, Muhammad Daffa Ruddin Alwi, and Marchelino Vidianto. “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Per Kapita, Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) Di 12 Provinsi Pada Tahun 2019-2023.” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Kebijakan (JESK)* 06, no. 01 (2024): 3. https://doi.org/https://doi.org/10.21274/jeps.v6i01.11033.

Romadona, Dika, Putri Mega Agustin, Muhammad Thoriqi, and Umi Fadlilatunnisa. “Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi , Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia” 3, no. 1 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.2774.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Sumatera Barat: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Saharuddin, Jiuhardi, Sri Wahyuni, and Diana Lestari. *Daya Saing SDM Dalam Globalisasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sartono, Puput Sawal, Etik Winarni, Barika, Septriani, Tri Kunawangsih Purnamaningrum, Antiyo Pracoyo, and Sri Yani Kusumastuti Puput Iswandiyah. *Buku Ajar Teori Ekonomi Makro (Edisi Ketiga)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Sirtama, Baiq Wihan. “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pembuktian Hipotesis Kuznets)” 5, no. 4 (2021): 654–64. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.17810.

Soekarwo. *Berkaca Dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*. Jakarta: PT Elex Media

Komputindo, 2018.
Soelistyo, Aris. *Model Maroekonometrik: Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia*. Jawa Timur: Uwais Inspiasi Indonesia, 2023.
Statistik, Badan Pusat. *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018.
Suardi, Moh. *Pengantar Ekonomi Makro*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2024.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
Sukarniati, Lestari, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, and Nurul Azizah Az Zakiyyah. *Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Tantangan Di Negara Berkembang*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
Syafi'I, Muhammad. *Ekonomi Pembangunan Regional Dan Perkotaan*. Medan: CV Media Kreasi Group, 2023.
Syayuti. *Investasi Ekonomi Dan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Jawa Tengah: NEM, 2022.
Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Indonesia: Erlangga, 2006.
Tuasela, Antje, and Nurlela. *Ekonomi Pembangunan*. Edited by Puput Tri Cahyono. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
Wahed, Muhammed, Sishadiyati, and Niniek Imaningsih. *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teori Dan Studi Empiris*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2021.
Wijayanto, Dian. *Buku Ajar Ekonomi Perikanan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
Yaqin, Nurul. *Pembangunan Nasional Pasca Reformasi Perspektif Sejarah Islam Dan Fiqih Imam Asy-Syafi'I*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2024.
Yususf, MuriYususf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: KENCANA, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2014.
Zed, Mestika. *Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2008.
Zulaikah, and Anas Malik. *Ekonomi Makro Islam*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi, 2023.